

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN ROKOK  
TANPA PITA CUKAI UNTUK MENCEGAH TERJADINYA  
KERUGIAN PAJAK NEGARA  
(Studi Pada Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah  
Sumatera Utara**

**Benni Rinaldi Karo-Karo\***  
**Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum\*\***  
**Dr. Mukidi, SE., SH., M.H\*\***

**ABSTRAK**

Tindak pidana penyelundupan sangat marak terjadi di Indonesia, hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjara. Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai di negara Republik Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai, bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.

Penyelundupan rokok tanpa pita cukai merupakan tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, khususnya Pasal 54. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan/atau denda hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai di negara Republik Indonesia dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai. Rokok. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Hambatan yang dilakukan Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya penyelundupan rokok yang tidak dilekati pita cukai apat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya anggaran dan SDM.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelundupan, Rokok.**

---

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**LAW ENFORCEMENT AGAINST SMUGGLING OF CIGARETTES  
WITHOUT EXCISE STAMPS TO PREVENT STATE TAX LOSSES  
(Study at Subdit I Indag Ditreskrimsus Police of North Sumatra**

**Benni Rinaldi Karo-Karo\***  
**Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum\*\***  
**Dr. Mukidi, SE., SH., M.H\*\***

**ABSTRACT**

*The crime of smuggling is very common in Indonesia, only in the imposition of criminal sanctions, the implementation is only focused on imprisonment. The problems in this discussion are how the legal regulations regarding the smuggling of cigarettes without excise tape are in the Republic of Indonesia, how the law is enforced against perpetrators of the crime of smuggling cigarettes without excise tape, what are the obstacles and efforts made by Subdit I Indag Ditreskrimsus Police of North Sumatra in preventing the smuggling of cigarettes without excise tape*

*This study uses a descriptive method through a normative approach (legal research) and field research, namely the approach to the problem, carried out by examining various legal aspects in terms of applicable regulations.*

*Smuggling of cigarettes without excise stamps is a criminal act regulated in Law Number 39 of 2007 concerning amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise, especially Article 54. The sanctions are imprisonment for a minimum of 1 year and a maximum of 5 years, and/or a fine of up to 10 times the value of the excise that should be paid*

*The results of the study indicate that the legal regulation on smuggling of cigarettes without excise stamps in the Republic of Indonesia is in Article 54 of Law Number 11 of 1995 as amended by Law Number 39 of 2007 concerning Excise. Cigarettes. Law enforcement against perpetrators of the crime of smuggling cigarettes without excise stamps is a criminal act regulated in Law Number 39 of 2007 concerning amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. The perpetrators can be subject to imprisonment of 1-5 years and a fine of 2-10 times the value of the excise that should be paid. The obstacles carried out by Subdit I Indag Ditreskrimsus Police of North Sumatra in preventing the smuggling of cigarettes that do not have excise stamps can be caused by several factors, including weak coordination between agencies, lack of budget and human resources.*

**Keywords: Law Enforcement, Smuggling, Cigarettes.**

*\*Student of the Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

*\*\*Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

*\*\*Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*